

Pengaruh PPKM Terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Cilacap

Angela Nadiantika^{*1} dan Moh. Aris Munandar²

^{1,2}Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Info Artikel

Article History

Disubmit 15 Januari 2023

Diterima 20 Mei 2023

Diterbitkan 29 Mei 2023

Kata Kunci

COVID-19; PSBB; PPKM; Cilacap

Abstrak

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sangat mengancam kesehatan manusia. Tidak hanya kesehatan namun bidang perekonomian juga terganggu. Oleh karena itu, berbagai kebijakan diberlakukan sebagai solusi keterpurukan perekonomian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keadaan PKL selama pandemi sebelum PSBB dan PPKM di Kabupaten Cilacap. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keadaan PKL selama pandemi setelah pemberlakuan PSBB dan PPKM di Kabupaten Cilacap. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa PPKM memiliki pengaruh terhadap pendapatan PKL di Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap. Dampak pemberlakuan PPKM terhadap pendapatan Pedagang Kaki Lima yaitu menyebabkan PKL dapat berjualan dengan adanya beberapa kelonggaran seperti waktu beroperasi dan dapat bertatap muka dengan pembeli menggunakan protokol kesehatan yang ditetapkan. Sehingga, adanya PPKM dapat meningkatkan kembali secara perlahan perekonomian PKL di Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap. Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap sangat puas dengan kebijakan yang diberlakukan karena dapat menghidupkan kembali perekonomian PKL yang sempat mengalami penurunan pada masa pandemi COVID-19. Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat dilakukan yaitu perlunya pengkajian dampak COVID-19 pada bidang lainnya dan pengambilan sampel dari beberapa pasar induk kecamatan di Kabupaten Cilacap.

Abstract

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pandemic seriously threatens human health. Not only health but the economic sector also disrupted. Therefore, various policies were enacted as a solution to the economic downturn. This study aims to determine the condition of street vendors during the pandemic before the PSBB and PPKM in Cilacap Regency. In addition, this study aims to determine the condition of street vendors during the pandemic after the implementation of the PSBB and PPKM in Cilacap Regency. The research method used was a quantitative research methods. Results showed that PPKM was an influence on the income of street vendors in Adipala District, Cilacap Regency. The impact of PPKM implementation on the income of PKL that it causes PKL to be able to sell with some concessions such as operating hours and being able to meet face to face with buyers using the established health protocols. Thus, the existence of PPKM can slowly increase the economy of PKL in Adipala District, Cilacap Regency. PKL in Adipala District, Cilacap Regency very satisfied with the policies implemented because they can revive the street vendors' economy which had experienced a decline during the COVID-19 pandemic. Based on the research results, suggestions in this study that can be made are the need to study the impact of COVID-19 on other fields and take samples from several sub-district wholesale markets in Cilacap Regency.

PENDAHULUAN

Sejak muncul di Wuhan, China, pada Desember 2019, penyakit *coronavirus* 2019 (COVID-19) telah berkembang pesat menjadi pandemi. Penyakit ini disebabkan oleh *Novel Coronavirus* (SARS-CoV-2) (Li et al., 2020) Hubei Province, China, in December 2019 and January 2020. We analyzed data on the first 425 confirmed cases

in Wuhan to determine the epidemiologic characteristics of NCIP. METHODS We collected information on demographic characteristics, exposure history, and illness timelines of laboratory-confirmed cases of NCIP that had been reported by January 22, 2020. We described characteristics of the cases and estimated the key epidemiologic time-delay distributions. In the early period of exponential growth, we estimated the epidemic doubling time and the basic reproductive number. RESULTS Among the first 425 patients with confirmed NCIP, the median age was 59 years and 56% were male. The majority of cases (55%. Peningka-

* E-mail: angelanadiantika44@gmail.com
Address: Gunungpati, Semarang, Indonesia, 50229

tan angka kematian akibat COVID-19 menyebabkan masyarakat Indonesia mengalami tingkat kekhawatiran yang cukup besar (Yunus, N. R., & Rezki, 2020). Kekhawatiran tergambar dari adanya rasa takut, stres, dan juga trauma masyarakat (Tauhid, 2021). Kasus COVID-19 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan jumlah kasus di awal bulan Januari 2022 yang nol (zero) kasus. Penularan COVID-19 terjadi dengan sangat cepat melalui tingkat kerumunan. Oleh karena itu, untuk mengurangi aktivitas yang berkerumun, beragam aktivitas dihentikan. Pemberhentian aktivitas dilakukan dengan melakukan penutupan tempat-tempat umum. Adapun penutupan ini dikenal dengan istilah *lock down*.

Bidang ekonomi sangat mengalami pengaruh yang besar akibat *lock down* (Roy, 2020). Hal ini dikarenakan, pada bidang ekonomi dipengaruhi oleh adanya mobilitas. Sedangkan, mobilitas pada masa pandemi COVID-19 sangat dibatasi bahkan tertutup. Bidang perekonomian yang mendapatkan dampak buruk akibat pemberlakuan *lock down* tidak hanya industri besar akan tetapi juga industri kecil. Indonesia merupakan negara yang didominasi oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini tentu memerlukan perhatian karena UMKM memiliki kontribusi besar pada bidang perekonomian negara (Nalini, 2021).

Wilayah industri di Jawa Tengah seperti Cilacap yang merupakan wilayah perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat juga mengalami dampak pembatasan beraktivitas. Salah satu jenis usahanya yaitu pada industri tempe. Usaha tempe mengalami keterpurukan akibat harga kedelai yang terus mengalami peningkatan (Meta Rizqi, 2021). Selain pada UMKM industri kegiatan perekonomian lain yang terdampak yaitu pedagang kaki lima.

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan pedagang yang menjual makanannya di pinggir jalan baik trotoar maupun tempat-tempat strategis (Qiptiyah, 2021). Pemilihan lokasi strategis untuk menjajakan makanan merupakan salah satu cara agar pejalan kaki, pengguna kendaraan dapat dengan mudah menjangkau. Namun, seiring dengan diberlakukannya *lock down*, PSBB, dan PPKM tentu tidak banyak masyarakat yang berkeliaran mencari kuliner pada hari-hari sebelum COVID-19. Terlebih, sebagai daerah perbatasan saat musim mudik lebaran seharusnya pedagang kaki lima dapat memperoleh keuntungan lebih. Namun, dengan diberlakukannya pembatasan mudik bahkan larangan mudik menyebabkan wilayah peralihan ini menjadi sepi. Sehingga, hal ini tentu berpengaruh pada laju perekonomian PKL di Kabupaten Cilacap (Kuswantoro, K., & Alfi, 2020).

Penelitian Ujung (2021), menunjukkan bahwa sebelum adanya pandemi, pedagang kaki lima masih mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan mereka pun bebas berjualan dimana saja sesuai daerah atau sudut jalan yang paling menguntungkan untuk hasil penjualannya. Pendapatan yang dihasilkan oleh pedagang kaki lima sebelum adanya pandemi COVID-19 dapat mencapai Rp 3.500.000-4.500.000/bulan. Pendapatan ini termasuk di dalam golongan pendapatan yang sangat tinggi karena hampir mencapai nilai UMR yang ada di beberapa daerah. Namun, setelah adanya COVID-19 dan PPKM, pendapatan yang diperoleh pedagang kaki lima hanya berkisar antara Rp 2.000.000-2.500.000/bulan, sehingga, pendapatan mereka dikategorikan sebagai golongan pendapatan sedang.

Berdasarkan identifikasi masalah dari latar belakang

diatas, penelitian ini mengkaji mengenai Persepsi Pedagang Kaki Lima terhadap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Sebagai Upaya Penanganan COVID-19 di Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap dengan fokus utamanya adalah dampak ekonomi pedagang kaki lima. Penelitian ini dapat berkontribusi penting terhadap peningkatan dan stabilitas perekonomian masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keadaan PKL selama pandemi sebelum PSBB dan PPKM di Kabupaten Cilacap dan untuk mengetahui keadaan PKL selama pandemi setelah pemberlakuan PSBB dan PPKM di Kabupaten Cilacap. Data yang dipilih dalam penelitian ini merupakan warga di Kecamatan Adipala, banyak warga sekitar mengisi sebagai pedagang kaki lima. Sebagai pedagang kaki lima, mereka menjual produknya di dalam kota namun saat ini tidak bisa dilakukan karena adanya PPKM.

METODE

Populasi dalam penelitian ini yaitu PKL yang berada di Pusat Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap. Sampel dalam penelitian ini dibatasi 3 ketentuan diantaranya (1) PKL yang telah berjualan lebih dari 3 tahun terhitung sebelum tahun 2020, (2) PKL yang berjualan pada siang hari dan malam hari, (3) PKL yang berusia 30 ke atas. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap. Variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas dalam penelitian ini yaitu persepsi PKL di Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap.

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data primer. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis kuantitatif deskriptif. Teknik analisis deskriptif yaitu teknik menganalisis hasil wawancara berupa data (data wawancara, observasi maupun dokumentasi) dan disusun secara sistematis menggunakan pendeskripsian.

HASIL PENELITIAN

Penelitian dengan judul Pengaruh PPKM Terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Cilacap telah berhasil dilakukan pada 14 Juni – 18 Juni 2022. Pengambilan data penelitian dilakukan di Pasar Induk Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap. Adapun, objek pada penelitian ini yaitu Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap dengan sampel di Pasar Induk Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap. Penelitian ini telah berhasil dilakukan dengan melibatkan PKL yang tersebar di Pasar Induk Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap. Hasil penelitian ini terbagi menjadi 2 bagian yaitu (1) Keadaan PKL sebelum dan setelah pandemi dan (2) Keadaan PKL selama pandemi sebelum dan selama setelah diperlakukan PPKM.

Keadaan PKL Selama Pandemi Sebelum Pemberlakuan PSBB dan PPKM

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan kondisi pengunjug sebelum dan setelah PPKM. Sebelum pandemi mayoritas PKL memiliki pelanggan yang ramai (56%), cukup ramai 67%), dan sangat ramai (79%). Sementara setelah terjadi pandemi, mayoritas pedagang mengalami penu-

runan jumlah pengunjung hampir 30% - 80%.

Penurunan pendapatan hasil penjualan PKL di Pasar Induk Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap berdasarkan hasil penelitian juga mengalami penurunan. Adapun hasil analisis terhadap 43 PKL menunjukkan data seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Pendapatan PKL Sebelum dan Setelah Pandemi

Pendapatan	Jumlah			
	Sebelum		Setelah	
Dibawah Rp 100.000	0	0%	20	47%
Rp 100.000 - Rp 200.000	27	63%	15	35%
Rp200.000 - Rp 500.000	15	35%	8	19%
Dibawah Rp 1.000.000	1	2%	0	0%
Lebih Rp 1.000.000	0	0%	0	0%

(Sumber : Olahdata, 2022)

Berdasarkan pada Tabel 1. terlihat bahwa pada masa sebelum pandemi penghasilan bersih rata-rata pedagang di antara Rp. 100.000 hingga dibawah Rp. 1.000.000. Sedangkan, pada masa pandemi pendapatan PKL hanya berada pada rentang dibawah Rp. 100.000 dan Rp. 500.000.

Selain perubahan pendapatan, sebelum dan selama pandemi juga terjadi perubahan waktu berjualan. Hasil penelitian menunjukkan sebelum pandemi COVID-19 PKL di Pasar Induk Kecamatan Adipala berjualan 6 – 7 hari per minggu. Sementara selama masa pandemi PKL berjualan mulai 5,6 atau 7 hari per minggu. Penurunan frekuensi PKL dalam berjualan mengindikasikan bahwa pandemi memiliki dampak pada aspek kehidupan. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebanyak 95% PKL merasakan adanya dampak ekonomi. Sedangkan, 16% merasakan dampak pandemi COVID-19 pada kesehatan dan 89% lainnya merasakan pada bidang-bidang yang lain.

Penurunan pendapatan yang cukup drastis menyebabkan beberapa PKL melakukan banting setir untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan pada hasil penelitian diketahui bahwa sebanyak 16% PKL mencari pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Sementara itu, beberapa PKL memenuhi kebutuhan ekonomi selama pandemi melalui beberapa cara seperti melakukan peminjaman, menggunakan tabungan dan juga mendapatkan bantuan.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa diperlukan adanya kebijakan-kebijakan yang diterapkan untuk mengatasi dampak pandemi bagi PKL. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah diantaranya dengan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Keadaan PKL Selama Pandemi Setelah Pemberlakuan PSBB dan PPKM

PSBB dan PPKM merupakan kebijakan-kebijakan pemerintah yang dilakukan sebagai upaya mengurangi dampak pandemi COVID-19. Aturan-aturan yang terdapat di dalam kebijakan yang ditetapkan diantaranya diberlakukannya waktu berjualan, batas kerumunan, jarak

berkomunikasi, penggunaan masker, dan mencuci tangan. Berdasarkan pada beberapa kebijakan tersebut dapat diketahui bahwa beberapa PKL memenuhi aturan disediakannya tempat mencuci tangan dan duduk dengan jarak yang ditentukan. Namun, berdasarkan hasil analisis yang dilakukan diketahui bahwa dari total PKL yang terdapat di Pasar Induk Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap hanya 16% yang berani melakukan teguran kepada pengunjung. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan beberapa alasan PKL tidak melakukan teguran terhadap pengunjung diantaranya (1) Takut pembeli pergi, (2) Takut pelanggan pergi, (3) Takut kehilangan pelanggan, dan (4) Khawatir pembeli merasa tersinggung. Teguran yang dilakukan oleh PKL pada umumnya dilakukan karena adanya beberapa pelanggaran seperti tidak menggunakan masker, bergembol dan juga tidak jaga jarak.

Dalam penelitian ini juga dilakukan analisis tingkat kepuasan terhadap aturan-aturan yang diberlakukan. Hasil analisis menunjukkan sebanyak 72% PKL puas dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan aturan-aturan yang ditetapkan membawa perubahan bagi pelaku usaha. Adapun perubahan yang dialami oleh PKL pada masa *lock down*, PSBB, dan PPKM terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Perbedaan Masa Lock Down, PSBB dan PPKM

Kondisi	Aturan Pemerintah		
	Lock Down	PSBB	PPKM
Tidak Ramai	43	41	32
Ramai	0	0	2
Cukup Ramai	0	2	5
Sangat Ramai	0	0	4

(Sumber : Olahdata, 2022)

Berdasarkan pada Tabel 2. dapat diketahui bahwa pada masa *lock down*, PSBB, dan PPKM terjadi perubahan jumlah pengunjung. Dimana jika pada masa *lock down* dari total PKL menyatakan 100% tidak ramai. Sementara pada masa PSBB yang menyatakan tidak ramai hanya 95% yang menyatakan tidak ramai. Kemudian, pada masa PPKM 74% menyatakan tidak ramai. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat penurunan jumlah PKL yang menyatakan tidak ramai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah kunjungan pelanggan pada masa *lock down* < PSBB < PPKM. Hal inilah yang mengindikasikan bahwa pedagang memiliki kepuasan terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah. Hasil analisis data penelitian melalui wawancara yang juga dilakukan kepada PKL menunjukkan bahwa PKL merasakan dampak positif dari aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Adapun pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh PKL melalui wawancara meliputi pembeli mulai meningkat, pembeli mulai bertambah, pembeli mulai membaik, penjual mengalami peningkatan namun tidak banyak, penghasilan mulai membaik, tidak terlalu sepi, pelanggan mulai sedikit naik, sudah mulai normal, penjualan mulai ada peningkatan, penghasilan ada peningkatan, masih belum meningkat, masih lumayan sepi, pembeli menurun namun perlahan ada kenaikan, su-

dah mulai membaik, walaupun belum seperti ketika tidak ada pandemi, pembeli mulai naik karena PPKM dilonggarkan, pendapatan mulai naik, namun belum normal, sudah mulai normal kembali, omset sudah mulai naik tetapi belum semula, pemasukan sudah mulai naik, tetapi belum seperti biasa, penjualan sudah mulai meningkat, pembeli sudah mulai meningkat karena jam dagang sudah normal, pembeli dan pemasukan meningkat.

Berdasarkan pada hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan PPKM lebih efektif dilakukan untuk mendongkrak pulihnya perekonomian. Hal ini dikarenakan dalam PPKM diberlakukannya kelonggaran dalam melakukan aktivitas di luar rumah dibandingkan saat diberlakukannya *lock down*. Pada sebuah kajian dilaporkan bahwa secara umum PPKM darurat efektif dalam mengatasi lonjakan kasus COVID-19 mulai pada pekan kelima PPKM. Penurunan kasus berbeda antar provinsi, DKI Jakarta mulai turun pada pekan ketiga, Banten dan Jawa Barat pada pekan keempat, serta Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur pada pekan kelima. Sementara itu, Bali belum juga menunjukkan penurunan kasus hingga pekan ketujuh PPKM (Yakhamid, R. Y., & Zaqi, 2021). Selain itu, pada kajian yang dilakukan oleh Mawuntu (2022) menyatakan bahwa efektivitas kebijakan PPKM skala mikro dalam penyebaran COVID19 di Desa Warembungan terlaksana dengan baik. Adapun hasil terkait kebijakan ini ialah tidak menambah adanya jumlah COVID19 di Desa Warembungan.

Berdasarkan pada kajian-kajian yang telah dilakukan maka penerapan PSBB dan PPKM sangat efektif dalam mengurangi peningkatan kasus COVID-19. Keadaan tersebut tentu memberi dampak positif pada beberapa sektor khususnya sektor ekonomi. Hal ini dikarenakan adanya peraturan PSBB dan PPKM maka perekonomian kembali membaik secara perlahan namun penyebaran COVID-19 dapat terkendali.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut (1) Jumlah pendapatan PKL sebelum PSBB dan PPKM mengalami penurunan hampir 100%, hal ini mengindikasikan bahwa keadaan penjualan yang dilakukan oleh PKL tidak ada pengunjung/tidak ramai, (2) Jumlah pendapatan PKL setelah PSBB dan PPKM sedikit mengalami peningkatan, hal ini ditandai dengan adanya peningkatan jumlah pem-

beli dalam kriteria ramai, cukup ramai, dan sangat ramai. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara, PKL sangat mendukung kebijakan PSBB dan PPKM. Adapun saran dalam penelitian ini yaitu perlunya pegkajian dampak COVID-19 pada bidang lainnya seperti kesehatan, politik, dan sosial. Serta pengambilan sampel dari beberapa pasar induk di Kabupaten Cilacap. Sehingga sudut pandang pemberlakuan PSBB dan PPKM di Kabupaten Cilacap tidak hanya dilihat dari Kecamatan Adipala yang strategis di bidang pariwisata saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Kuswantoro, K., & Alfi, I. (2020). Strategi Keuangan UMKM Cilacap Menghadapi Pandemi Covid 19 (Studi Kasus UMKM Kabupaten Cilacap). *Jurnal Teknologi Dan Bisnis*, 2(1), 40–51.
- Li, Q., Guan, X., Wu, P., Wang, X., Zhou, L., Tong, Y., Ren, R., Leung, K. S. M., Lau, E. H. Y., Wong, J. Y., Xing, X., Xiang, N., Wu, Y., Li, C., Chen, Q., Li, D., Liu, T., Zhao, J., Liu, M., ... Feng, Z. (2020). Early Transmission Dynamics in Wuhan, China, of Novel Coronavirus-Infected Pneumonia. *New England Journal of Medicine*, 382(13), 1199–1207. <https://doi.org/10.1056/nejmoa2001316>
- Mawuntu, P., RARES, J., & PLANGITEN, N. (2022). Efektivitas Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Ppkm) Skala Mikro Dalam Penyebaran Covid-19 Di Desa Warembungan. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(113).
- Meta Rizqi, N. U. (2021). Manajemen Pemasaran Umkm Produk Tempe Pada Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus Pada Umkm Produk Tempe Dusun Cipicung, Desa Bengbulang, Kec. Karangpucung, Kab. Cilacap. *Skripsi Thesis, IAIN Purwokerto*.
- Nalini, S. (2021). Dampak Dampak covid-19 terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 4(1), 662–669.
- Qiptiyah, M. (2021). *Siasat Pedagang Kaki Lima di tengah Pandemi Covid-19 di Pasar Porong Kabupaten Sidoarjo*.
- Roy, S. (2020). *Economic impact of COVID-19 pandemic*. 1–29.
- Tauhid, Muhammad Taufiq, Adi Hidayat Argubi, & S. (2021). Penyuluhan Perubahan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat Masyarakat Dalam Pencegahan Covid-19. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(4).
- Yakhamid, R. Y., & Zaqi, N. A. R. (2021). Efektivitas PPKM Darurat Dalam Penanganan Lonjakan Kasus Covid-19. *In Seminar Nasional Official Statistics*, 1, 235–244.
- Yunus, N. R., & Rezki, A. (2020). Kebijakan pemberlakuan lock down sebagaiantisipasi penyebaran corona virus Covid-19. *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(3), 227–238.